

PEMERINTAH LOKAL SEBAGAI BENTENG PERTAHANAN TERAKHIR SITUASI VUCA DI INDONESIA

Oleh

Audori Fathin, Anang D. Santoso, Annisa Wiharani





**PEMERINTAH LOKAL SEBAGAI
BENTENG PERTAHANAN TERAKHIR
SITUASI VUCA DI INDONESIA**

Pemerintah Lokal Sebagai Benteng Pertahanan Terakhir Situasi VUCA di Indonesia

Penulis :
Audori Fathin
Anang D.Santoso
Annisa Wiharania

Ucapan Terima Kasih :
Dalam penulisan ini kami sampaikan terimakasih
kepada segenap Peneliti Forbil Institute Rini Wijayanti;
Peneliti IGPA Dyah Ratih Sulistyastuti,
Kurnia Cahyaningrum Effendi, Cinintya Audori Fathin;
Dosen Universitas Sriwijaya Anang Dwi Santoso;
Dosen Komunikasi Universitas Pembangunan Negeri
"Veteran" Yogyakarta Arika Bagus Perdana;
Annisa Wiharani PhD Candidate Groningen University
yang telah memberikan masukan dalam proses penulisan artikel berikut

Yogyakarta, Indonesia
Mei 2020

Hak Cipta © oleh IGPA dan Forbil Institute



VUCA merupakan akronim yang terdiri dari *Volatility* (kondisi yang tidak stabil), *Uncertainty* (ketidakpastian), *Complexity* (kompleksitas), dan *Ambiguity* (ambiguitas) (Kessler 2019; Bennett & Lemoine 2014). Dalam konteks kebijakan publik, VUCA menggambarkan kondisi yang fluktuatif dan tidak stabil di ranah urusan publik yang disebabkan oleh suatu perubahan yang sangat cepat dan fundamental (Sharif & Irani 2017). Pendekatan VUCA sangat tepat untuk menggambarkan gelombang pandemic COVID-19 yang saat ini sedang menimpa banyak negara tidak terkecuali Indonesia. Sejalan dengan akronim tersebut di atas, secara mendadak masyarakat Indonesia mengalami perubahan yang sangat signifikan di berbagai sektor. Perubahan yang tidak stabil dan diikuti oleh berbagai kompleksitas permasalahan, kurangnya informasi dan ketidakpastian akan berapa lama pandemic ini akan berjalan membuat pemerintah kesulitan untuk mengambil kebijakan yang dianggap paling sesuai untuk menangani krisis ini. Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa masalah kesehatan masyarakat terkait COVID-19 ini merupakan bencana nasional non-alam dan akan terus dilakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang telah diimplementasikan (Djalante et al. 2020). Sejauh ini banyak kebijakan pemerintah yang menuai kritik dan dianggap kurang tepat dan cepat untuk merespon situasi terkini. Meskipun, kebijakan yang diformulasikan sebagai respon terhadap situasi VUCA pastinya akan selalu mengalami perbaikan dan perubahan sesuai dengan kondisi terbaru. Namun demikian hingga saat ini belum ada peta maupun respon kesiapsiagaan terbaik dari berbagai negara yang terdampak COVID.

Di tengah ketidakpastian, pemerintah daerah yang berada di antara pemerintah nasional dan masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam menjembatani kebijakan pusat dan implementasi di daerah (Lau et al. 2020). Dengan kata lain, pemerintah daerah berada di garis terdepan pertarungan. Lebih dari setengah populasi dunia tinggal di daerah perkotaan yang semakin memperbesar risiko pandemi. Jauh sebelum pandemi datang, kota sudah cukup berjuang mengatasi berbagai permasalahan seperti misalnya kesehatan, daerah kumuh, sampah dan lain sebagainya. Saat ini beban dari pemerintah daerah semakin bertambah ketika mereka dihadapkan pada kondisi yang penuh dengan ketidakpastian dimana setiap hari ada warga yang kehilangan pekerjaan dan pendapatannya, jatuh sakit apalagi meninggal dikarenakan pandemic ini. Berbagai pedoman pembatasan social maupun physical distancing tidak hanya memberatkan tapi juga hampir tidak mungkin diterapkan bagi jutaan warga yang berada di bawah garis kemiskinan di berbagai kota di Indonesia. Di Indonesia sebanyak 55,72% angkatan kerja atau sekitar 70,49 juta orang dari jumlah penduduk bekerja menggantungkan hidupnya pada pekerjaan sektor informal (Kompas, 2020). Banyak dari mereka yang tidak memiliki kontrak kerja yang jelas, asuransi kesehatan dan bahkan rekening bank. Dengan kata lain, ada sebagian besar penduduk sebuah daerah yang tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk bertahan hidup tanpa melanggar aturan *physical distancing*. Untuk itu diperlukan respon dan kebijakan dari pemerintah daerah bersifat fleksibel dan *customized* yang mengasumsikan bahwa seluruh warga akan mendapatkan hak yang kurang lebih sama tentunya dengan menyesuaikan karakter daerah masing-masing.

Saat ini ada berbagai variasi respon kota dan daerah dalam menanggapi pandemic dengan menyesuaikan karakter daerah masing-masing. Sejak ditemukan kasus pertama pasien terinfeksi COVID-19 di Indonesia, beberapa pemerintah daerah dan bahkan instansi daerah secara cepat mulai menginisiasi kebijakan terkait COVID-19 sebagai langkah pencegahan dan penanganan tanpa menunggu perintah dari pemerintah pusat. Berbagai pengalaman sederhana namun signifikan dalam situasi tanggap darurat membuktikan bahwa kota dan kabupaten cukup mampu untuk memobilisasi sumber daya yang mereka miliki dengan segala keterbatasannya. Yang perlu dipastikan adalah bahwa pemerintah daerah khususnya para walikota/bupati dan aktor pengambil keputusan lainnya memiliki cukup informasi yang mereka butuhkan untuk memimpin warganya melalui krisis ini (Weible et al. 2020). Dengan berbagi pengalaman dari daerah-daerah yang telah melakukan inisiatif di tempat masing-masing, diharapkan tulisan ini juga menjadi salah satu sumber informasi bagi wilayah lain untuk menerapkan kebijakan menghadapi pandemi COVID-19. Kota atau kabupaten bisa menjadi sebuah benteng pertahanan terakhir bagi warganya.

Menarik untuk diketahui, jauh sebelum pemerintah pusat secara resmi merilis kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) banyak pemerintah daerah bahkan instansi-instansi terkait di bawah pemerintah daerah yang telah secara spesifik menginisiasi kebijakan pencegahan terhadap COVID-19. Salah satu inisiatif awal terkait hal ini telah dilakukan oleh pemerintah kota Tegal yang memberlakukan Lockdown lokal mandiri sebelum pemerintah pusat mengeluarkan peraturan PSBB dengan memasang pagar beton (moveable concrete barrier - MCB) di 49 akses pintu masuk dan keluar kota Tegal. Saat ini Kota Tegal juga menjadi kota pertama di provinsi Jawa Tengah yang memberlakukan PSBB. Lockdown lokal yang dilakukan selama sekitar 4 bulan juga diikuti dengan beberapa inisiatif lokal seperti misal pembagian "Rantang Lansia". Adalah kebijakan pemerintah kota untuk mengirimkan rantang makanan dari berbagai warung Tegal bagi 600 warga lanjut usia. Kebijakan ini juga bekerjasama dengan grab ojek online setempat.



Sumber foto :
<https://jateng.idntimes.com/news/jateng/dhana-kencana-1/daerah-di-jawa-tengah-jadi-zona-merah-virus-corona/3>

Urgensi Pemerintah Daerah Melakukan Inisiatif Kebijakan Dalam Situasi VUCA

Dalam situasi pandemi seperti saat ini, pemerintah daerah menghadapi situasi krisis ganda. Pertama, pemerintah daerah harus menangani keadaan darurat kesehatan masyarakat, dan yang kedua adalah krisis ekonomi. Ini merupakan efek domino dari krisis ekonomi yang sedang dihadapi oleh pemerintah pusat. Lebih lanjut lagi, kondisi ekonomi yang tidak menentu ini akan memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat, terlebih lagi ketika kebijakan PSBB diberlakukan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu sesegera mungkin melakukan inisiasi kebijakan penanggulangan krisis karena ambiguitas dan lambatnya pemerintah pusat dalam menangani COVID-19 di level daerah.

Regulasi Daerah: Jantung Pemulihan Ekonomi Dan Sosial

Situasi seperti ini adalah momen yang tepat untuk menunjukkan kembali kehadiran pemerintah daerah dengan mengubah peranan dari dominasi ke governance (Gao & Yu 2020). Pemerintah daerah tidak lagi dilihat sebagai penyedia layanan tunggal tetapi ia harus membuat regulasi sebagai landasan berbagai macam inisiatif dan tindakan kolektif. Secara umum, informasi, pengambilan keputusan dan pelaksanaan adalah elemen penting bagi pemerintah daerah dalam membangun dan menjalankan mekanisme manajemen darurat kesehatan masyarakat. Secara lebih spesifik, kami menemukan bahwa regulasi daerah yang dihasilkan sangat bervariasi dari mulai peraturan bupati/walikota, keputusan bupati/walikota sampai dengan surat edaran atau hanya sekedar himbauan. Salah satu kabupaten yang secara tangkas merespon COVID-19 ini adalah Kabupaten Bantul.



Sumber foto :
<https://mediaindonesia.com/read/detail/312543-apbd-bantul-menjadi-sapu-jagat-tuntaskan-bansos-covid-19>

Kabupaten Bantul telah menerbitkan 7 Peraturan Bupati, 10 Keputusan Bupati, dan 3 Instruksi Bupati. Yang menarik adalah peraturan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penanggulangan COVID-19 namun juga peraturan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku bisnis. Diantara peraturan yang secara khusus dibuat untuk tujuan tersebut adalah Peraturan Bupati Tahun 2020 Nomor 34 Tentang Pengurangan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Pada Masa Tanggap Darurat Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Bantul peraturan ini berisi tentang pengurangan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir kepada wajib pajak hotel, wajib pajak restoran, wajib pajak hiburan, dan wajib pajak parkir sebesar 100% (seratus persen). Aturan lainnya adalah Keputusan Bupati Tahun 2020 Nomor 209 Tentang Pembebasan Retribusi Pengolahan Limbah Cair dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk Objek Retribusi Rumah Sederhana Sewa pada Masa Tanggap Darurat Bencana COVID-19 di Kabupaten Bantul. Selain itu terdapat pula Keputusan Bupati Nomor 185 tentang Pembebasan Retribusi Pelayanan Pasar pada masa Tanggap Darurat COVID-19 di Kabupaten Bantul Bupati Bantul juga memberikan bantuan jaminan hidup kepada keluarga pasien PDP dan ODP dan pelaku perjalanan terdampak COVID-19 sebesar Rp. 500.000,- sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tahun 2020 Nomor 40.

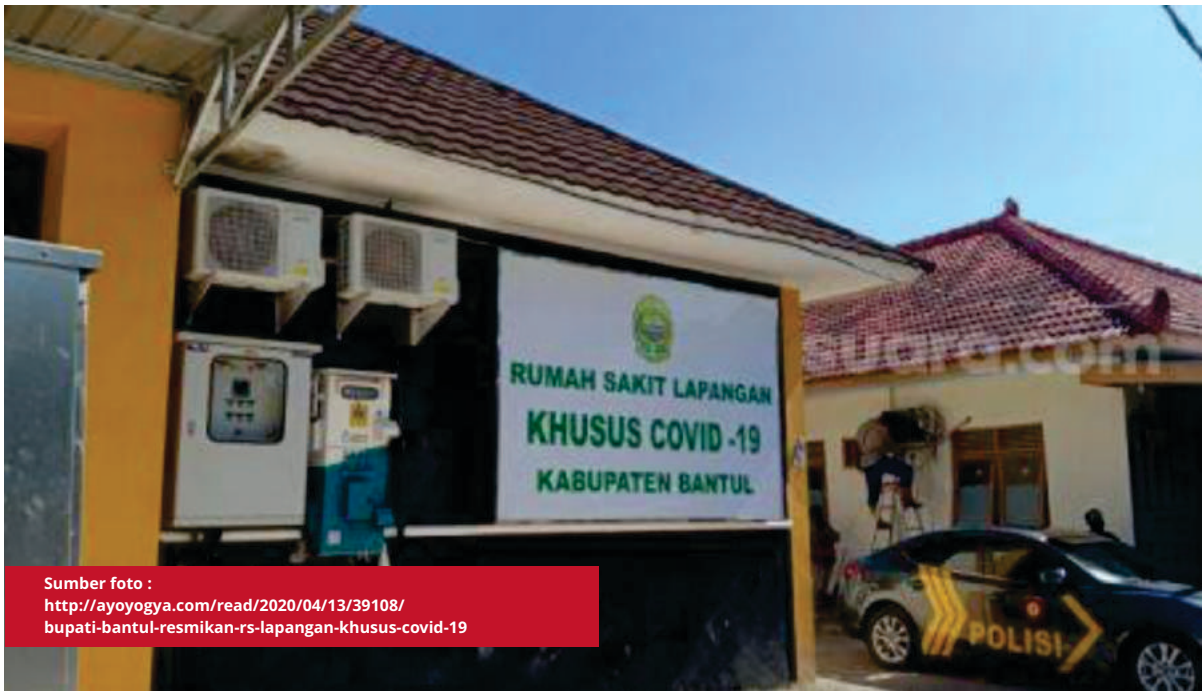
Inisiatif Kabupaten Bantul dalam pembuatan berbagai macam regulasi berkaitan dengan COVID-19 merupakan bentuk responsivitas tidak hanya untuk penyelesaian krisis kesehatan tetapi juga dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan akibat bencana ini. Langkah ini merupakan bentuk kesadaran bahwa regulasi mampu meringkaskan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan layanan penting untuk terus berfungsi dalam situasi di mana layanan yang diproduksi oleh sektor publik dan swasta tidak dapat berfungsi secara normal (OECD 2020). Regulasi juga merupakan jantung pemulihan ekonomi, sosial dan kesiapan yang lebih baik untuk krisis di masa yang akan datang.



Sumber foto :
<https://mediaindonesia.com/read/detail/277236-sekolah-non-formal-di-sanggau-lebih-diminati>

Pendidikan: Minim Akses Internet Bukan Hambatan

COVID-19 juga memberikan dampak pada sektor pendidikan yang otomatis juga harus turut serta memodifikasi kegiatan belajar mengajar untuk membatasi penyebaran. Namun sayangnya tidak semua daerah mampu memfasilitasi proses pembelajaran jarak jauh. Pengalaman dari Kabupaten Sanggau di provinsi Kalimantan Timur, perbatasan Indonesia dan Malaysia memiliki kisah tersendiri. Kontur daerah Kabupaten Sanggau yang tidak terjangkau oleh jaringan internet di seluruh wilayahnya, dan keterbatasan kemampuan orang tua murid untuk membeli paket data internet untuk mendukung kegiatan belajar mengajar putra-putrinya merupakan beberapa kendala yang cukup signifikan. Teknologi terkadang tidak menjangkau atau bahkan tidak terjangkau oleh sebagian besar warga masyarakat, terlebih di era yang penuh ketidakpastian ini. Untuk itu guru-guru siswa sekolah dasar setempat bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia (RRI) dikarenakan sinyal radio yang lebih mudah untuk diakses. Sejauh ini metode tersebut cukup berhasil diimplementasikan, dan memiliki banyak manfaat selain membatasi resiko penularan juga cukup ekonomis bagi orang tua murid yang memiliki prioritas mencukupi kebutuhan dasar keluarga. Di saat yang bersamaan, anak-anak tidak kehilangan haknya untuk mendapatkan ilmu. Untuk itu diperlukan inovasi-inovasi daerah yang tidak hanya ditujukan bagi kaum privilege tapi juga bagi warganya yang kurang beruntung agar kelangsungan proses pembelajaran jarak jauh tetap terlaksana.



Kesehatan: Inisiatif Puskesmas dalam Pencegahan Penularan

Merespon keadaan darurat kesehatan masyarakat saat ini, pemerintah daerah diwajibkan untuk bergerak sangat cepat dan secara efektif mengoordinasikan pembagian kerja dan kerja sama di semua level organisasi pemerintah daerah (OPD) dalam suatu sistem birokrasi. Namun, terlepas dari banyaknya jumlah perencanaan, persebaran informasi dan sumber daya keuangan yang tersedia, COVID-19 membuat banyak infrastruktur kesehatan di berbagai daerah cukup kewalahan. Daerah saat ini sedang diuji secara ekstrim dengan pandemi coronavirus ini. Di bidang kesehatan, kurangnya peralatan dan kekurangan tempat tidur rumah sakit adalah salah satu ancaman terbesar bagi pemerintah daerah. Selain itu bagaimana pemerintah daerah mengedukasi warganya mengenai penyebaran epidemi ini tanpa menimbulkan kepanikan juga menjadi tantangan tersendiri. Di sisi lain kepanikan juga terjadi di *lower level governance* di bidang kesehatan yang langsung berhadapan dengan masyarakat luas, seperti misalnya di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Berhadapan langsung dengan warga masyarakat, puskesmas juga memiliki peran yang sama penting dan sama beresikonya dengan rumah sakit. Jika di rumah sakit menangani korban yang kondisinya memerlukan perawatan dan pemantauan secara intensif, puskesmas bertugas untuk memantau masyarakat baik yang memiliki gejala maupun tidak supaya kondisinya tidak lebih memburuk dan membahayakan dirinya sendiri dan orang di sekitarnya.

Pengalaman salah satu puskesmas di kota Sleman berhadapan dengan pandemik ini cukup menarik untuk dibagi. Di awal pandemic, ketika belum ada kepastian kebijakan dari pemerintah pusat untuk situasi COVID, puskesmas ini melakukan beberapa inisiatif sebagai upaya untuk promotif dan preventif penyebaran virus di kalangan masyarakat.

- a. Membatasi ruang tunggu dengan menerapkan physical distancing untuk mengurangi resiko penularan

- b. Menyiapkan satu petugas untuk memeriksa suhu tubuh dengan termometer infrared dan membersihkan tangan dengan hand sanitizer sebelum masuk ke puskesmas. Aturan ini berlaku bagi semua pasien, pengantar yang berkunjung, maupun seluruh petugas puskesmas tersebut tanpa terkecuali.
- c. Pembatasan akses pintu masuk dan keluar di puskesmas supaya tidak ada pasien atau pengantar yang lolos dari proses screening
- d. Pemilahan poliklinik dengan cara membuat tenda darurat khusus untuk poliklinik batuk dan demam di luar gedung puskesmas.
- e. Memilah pasien yang baru pulang dari zona merah dengan pasien biasa.
- f. Membuat himbauan untuk masyarakat baik secara tertulis maupun melalui media sosial untuk tidak datang ke fasilitas kesehatan kecuali dalam kondisi emergency.
- g. Melayani rujukan melalui whatsapp dan pasien bisa langsung ambil di meja satpam keesokan harinya.

Beberapa inisiatif di atas dilaksanakan secara lintas sektoral dengan melibatkan camat, lurah desa, koramil, TNI, polsek dan masjid-masjid setempat. Pentingnya koordinasi ini untuk membantu proses sosialisasi mengenai pencegahan COVID seperti misalnya stay at home, cuci tangan yang benar, juga untuk menindaklanjuti mereka yang tidak mau dikarantina. Puskesmas juga menggunakan pengeras suara masjid untuk sosialisasi bagi warga yang tidak dapat mengakses internet.

Ekonomi: Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan

Implementasi kebijakan PSBB memberikan dampak secara signifikan terhadap pendapatan masyarakat, khususnya bagi mereka yang bekerja dalam sektor informal. Kelompok informal ini menjadi kelompok rentan yang harus diperhatikan. Salah satu inisiatif daerah yang telah dilakukan untuk mencegah semakin memburuknya kondisi ekonomi di masyarakat dapat dilihat pada praktek yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan dan Kabupaten Musi Banyuasin. Dinas Sosial Kabupaten Magetan menginisiasi pembelian nasi bungkus di warung-warung sepi pembeli yang diakibatkan oleh implementasi PSBB. Nasi bungkus yang dibeli dari pedagang tersebut kemudian didistribusikan kepada warga terdampak yang tidak memiliki pendapatan ketika PSBB diberlakukan. Lebih lanjut lagi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Pertanian dan Ketahanan Pangan membeli pisang dari petani pisang untuk didistribusikan kepada tenaga medis di kabupaten tersebut. Selain itu, Dinas Peternakan juga membeli susu dalam jumlah banyak dari peternak susu di daerah Singolangu. Susu didistribusikan di dalam tabung untuk menjaga kesegaran dan dikirim setiap pagi dan sore ke puskesmas dan rumah sakit. Sumber dana untuk pembelian sumber daya lokal yang dimiliki Kabupaten Magetan ini berasal dari pergeseran alokasi APBD. Di Kabupaten Banyuasin, pemerintah daerah menerapkan kebijakan gratis pembayaran tagihan PDAM selama 3 bulan, terhitung dari bulan April-Juni, yang ditujukan untuk kelompok masyarakat tertentu diantaranya kelompok sosial umum, sosial khusus, rumah tangga sederhana dan rumah tangga menengah. Selain itu, pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin juga mendistribusikan bantuan uang tunai dari APBD sebesar 400.000 rupiah per kepala keluarga bagi keluarga miskin. Inisiasi kebijakan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Magetan dan Musi Banyuasin ini merupakan langkah tanggap untuk meminimalisir jatuhnya perekonomian daerahnya dan melindungi kelompok rentan yang berasal dari pekerja informal.



The screenshot shows the website interface for Tangerang Live. At the top, there is a navigation menu with links: HOME, DATA, INFO PENTING, PEMERIKSAAN, BERITA, FAQ, KONTAK, and LOGIN. The main banner features an illustration of a man with a beard and a blue shirt holding a smartphone, standing next to bags of rice and corn. The text on the banner reads: "AJUKAN PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL SECARA MANDIRI DI MENU PERMOHONAN BANSOS PADA APLIKASI TANGERANG LIVE" and "DOWNLOAD APLIKASINYA DISINI". The website logo "tangerangkota.go.id" is visible in the top right corner.

DATA
Situasi Virus Corona (COVID-19)

Negara / Kawasan		
216		
Kasus Terkonfirmasi	Sembuh	Kematian
4.628.903		312.009
Indonesia		
Positif	Sembuh	Meninggal
18.910	6.724	1.101

Komunikasi publik

Pemerintah daerah berperan penting dalam mengurangi kepanikan di kalangan masyarakat akibat dari kondisi ketidakpastian dan ambiguitas dengan menyediakan ruang komunikasi publik, sehingga masyarakat mudah untuk mendapatkan akses informasi yang akurat. Namun rumitnya tatanan birokrasi di Indonesia sangat memungkinkan bahwa informasi yang akurat akan sulit untuk sampai kepada masyarakat. Untuk meminimalisir mal informasi tersebut, pemerintah daerah sebagai garda terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat diharapkan mampu memfasilitasi penyaluran informasi publik. Hal yang penting untuk dilihat lebih lanjut adalah upaya Pemerintah Daerah Kota Tangerang dalam menyalurkan informasi penting terkait COVID-19 melalui *website* daerah yang informatif. Dalam *website* tersebut terpapar informasi terkait jumlah warga positif terdampak COVID-19, jumlah warga yang berhasil sembuh, dan angka kematian karena COVID-19. Selain itu juga terdapat informasi akurat mengenai kebijakan pemerintah pusat maupun daerah yang diimplementasikan di Kota Tangerang, serta himbauan-himbauan bagi pelaku usaha maupun masyarakat secara umum. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir ambiguitas persepsi masyarakat terhadap kebijakan yang diberlakukan dengan menyediakan saluran informasi yang terpusat dan terjamin akurasiya.

Penutup: Kota / Kabupaten adalah bagian dari solusi menghadapi situasi VUCA.

Kota memainkan peran yang cukup vital dalam mempersiapkan strategi untuk beradaptasi dengan pandemi. Masalah publik yang timbul akibat dari situasi yang serba tidak menentu saat ini memberikan *multi-layered effect* di berbagai bidang seperti kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan sektor-sektor krusial lainnya apabila tidak segera ditangani dengan cepat. Sebagai contoh, saat ini berbagai macam masalah baru muncul di masyarakat, seperti halnya munculnya kelompok rentan baru dan *homeless* di berbagai wilayah di Indonesia dikarenakan pemutusan hubungan kerja sehingga mereka tidak lagi memiliki pendapatan untuk membayar tempat tinggal dan memutuskan untuk keluar dari kontrakan atau indekos yang sebelumnya mereka tempati. Fenomena sosial seperti ini tentunya merupakan efek domino dari krisis ekonomi yang dihadapi Indonesia karena pandemi. Selain itu, masalah di ranah politik salah satunya adalah menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hal ini disebabkan oleh kesimpangsiuran informasi yang didapat oleh publik, sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. Padahal, daerah membutuhkan informasi yang lebih mendukung untuk mengelola krisis langsung melalui berbagai platform yang akan membantu mereka untuk mempercepat formulasi kebijakan. Relevansi terhadap kondisi dan situasi masing-masing daerah yang disertai dengan saran-saran yang sifatnya praktikal dan humanis.

COVID-19 membutuhkan respon global, dimana daerah termasuk di dalamnya. Tanpa respon dan inisiatif lokal kebijakan global dari Badan kesehatan internasional (WHO) dan kebijakan pemerintah nasional akan sulit untuk diimplementasikan. Peranan kota sangat penting untuk menciptakan ruang yang melindungi kesehatan dan kesejahteraan warganya di tengah kondisi VUCA. Sekecil apapun langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah memiliki dampak yang cukup luas dan signifikan bagi setiap warganya. Keterbatasan sumber daya baik manusia maupun finansial yang menjadi masalah di sebagian besar pemerintah daerah, selama ini justru memunculkan banyak inovasi kebijakan yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Tulisan ini diharapkan dapat menginspirasi dan menyebarkan pesan serta harapan bagi daerah-daerah lain selama masa-masa sulit ini.



Sumber foto :
<https://merahputih.com/post/read/istimewa-pertumbuhan-ekonomi-yogyakarta-di-atas-pencapaian-pertumbuhan-ekonomi-nasional>



Referensi

- Bennett, N. & Lemoine, G.J., 2014. What VUCA Really. *Harvard Business Review*, 92(February), p.2014.
- Djalante, R. et al., 2020. Review and analysis of current responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020. *Progress in Disaster Science*, 6, p.100091.
- Gao, X. & Yu, J., 2020. Public governance mechanism in the prevention and control of the COVID-19: information, decision-making and execution. *Journal of Chinese Governance*, pp.1–20. Available at: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23812346.2020.1744922> [Accessed May 10, 2020].
- Kessler, V., 2019. Leading in a VUCA World Integrating Leadership, Discernment and Spirituality.
- Lau, H. et al., 2020. The positive impact of lockdown in Wuhan on containing the COVID-19 outbreak in China. *Journal of Travel Medicine*, 001(714).
- OECD, 2020. *Regulatory Quality and COVID-19: Managing the Risks and Supporting the Recovery*, Washington.
- Sharif, A.M. & Irani, Z., 2017. Policy making for global food security in a volatile, uncertain, complex and ambiguous (VUCA) world. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 11(4), pp.523–534.
- Weible, C.M. et al., 2020. COVID-19 and the policy sciences: initial reactions and perspectives. *Policy Sciences*, pp.1–17.

<https://kompas.id/baca/foto/2020/02/01/pekerja-informal-ibu-kota/>


**PEMERINTAH LOKAL SEBAGAI
BENTENG PERTAHANAN TERAKHIR
SITUASI VUCA DI INDONESIA**




Created by




**Institute of Governance
and Public Affairs**

 igpa.map.ugm.ac.id

 [igpa.mapfisipolugm](https://www.instagram.com/igpa.mapfisipolugm)



Forbil Institute

 forbil.id

 [forbilinst](https://www.instagram.com/forbilinst)